

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:	Kabupaten Kebumen
Tahun Penilaian	:	2026
Periode yang dinilai	:	RPJMD 2025-2029
Urusan Pemerintahan	:	1. Urusan Tenaga Kerja
		2. Urusan Transmigrasi
		3. Urusan Energi Sumberdaya Mineral
OPD yang Dinilai	:	Dinas Tenaga Kerja
Sumber Data	:	RPJMD 2025-2029 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan
Sasaran Strategis	1	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Tenaga Kerja
	2	Meningkatnya pemberdayaa angkatan kerja perempuan
	3	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
	4	Meningkatnya transmigran yang menetap
	5	Meningkatnya pemanfaatan EBT
IKU Renstra OPD	IKU	2026
	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 78,25%
	2	Nilai Kepuasan Transmigran 83
	3	Tingkat pemanfaatan EBT dalam Pembangunan 100%
	4	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan mendapatkan sertifikat kompetensi 100%
	5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 67,46%
	6	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja 28,53%
	7	Persentase Kumulatif Transmigran yang Menetap 100%
	8	Persentase pemanfaatan EBT 50%
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	4	Program Penempatan Tenaga Kerja
	5	Program Hubungan Industrial
	6	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 1 Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan Sasaran 1 Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Tenaga Kerja 2 Meningkatnya pemberdayaa angkatan kerja perempuan 3 Meningkatnya keterserapan tenaga kerja 4 Meningkatnya transmigran yang menetap 5 Meningkatnya pemanfaatan EBT IKU Tujuan 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 78,25% 2 Nilai Kepuasan Transmigran 83 3 Tingkat pemanfaatan EBT dalam Pembangunan 100% IKU Sasaran 1 Persentase tenaga kerja yang dilatih dan mendapatkan sertifikat kompetensi 100% 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 67,46% 3 Persentase Keterserapan Tenaga Kerja 28,53% 4 Persentase Kumulatif Transmigran yang Menetap 100% 5 Persentase pemanfaatan EBT 50% Program 1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 5. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	



Kebumen, 21 November 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen

Corro Amnato, S.IP, M.Kes
Peminda Utama Muda
NIP. 198611291987021004

Penetapan Konteks Operasional OPD

Nama Pemda	Kabupaten Kebumen		
Tahun Penilaian	2026		
Periode yang dinilai	RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	1. Urusan Tenaga Kerja 2. Urusan Tenaga Kerja 3. Urusan Energi Sumber Daya Mineral		
OPD yang Dinilai	Dinas Tenaga Kerja		
Sumber Data	RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Tahun 2025-2029, dan Renja 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan		
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	5	Program Hubungan Industrial	
	6	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
	7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
Program Dinas	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Tenaga Kerja (Renja 2026) dan Kegiatan Utama		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
		2.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		3.1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		3.2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
		3.3 Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	
		4.1 Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
		4.2 Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
	5	Program Hubungan Industrial	
		5.1 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	6	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
		6.1 Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah kabupaten/kota	
	7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		7.1 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1	1.1.1 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen
		1.1.2 Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Dokumen
	2	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat	12 bulan
		1.2.1 Jumlah Orang yang menerima Gaji	45 orang
		1.2.2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
		1.2.3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
	3	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	1 Kegiatan
		1.3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang
	4	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat	12 bulan
		1.4.1 Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 unit
		1.4.2 Jumlah bulan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan
		1.4.3 Jumlah bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan
		1.4.4 Jumlah bulan Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan
		1.4.5 Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Dokumen
		1.4.6 Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 kali
		1.4.7 Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan
	5	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang	12 Unit
		1.5.1 Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0 unit
	6	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	12 bulan
		1.6.1 Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan
		1.6.2 Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan
		1.6.3 Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan

Program, Kegiatan utama dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	7	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	122 unit
	1.7.1	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 unit
	1.7.2	Jumlah Mebel yang Dipelihara	250 unit
	1.7.3	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	50 unit
	1.7.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	21 unit
	8	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen
		Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro	7 orang
	9	Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi	9 paket @ 18 Orang
	1.8.1	Jumlah orang pencari kerja yg mengikuti pelatihan	144 orang
	10	Jumlah LPKS yang dibina	30 orang
	1.8.2	Jumlah instruktur LPKS terbina	30 orang
	11	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	2.798 orang
	1.9.1	Jumlah pencari kerja yang terlayani melalui mekanisme antar kerja	12000 tahun
	1.9.2	Jumlah terselenggaranya kegiatan layanan stabilitas	1 kegiatan
	1.9.3	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	2.798 orang
	12	Jumlah CPM/PMI Yang Terlindungi	1400 orang
	1.10.1	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi	300 orang
	13	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	10 Kasus
	1.11.1	Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial	7 kasus
	14	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan	2 Dokumen
	1.12.1	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan	2 Dokumen
	15	Jumlah keseluruhan KK Transmigrasi yang ditempatkan	3 KK
	1.13.1	Jumlah calon transmigran ditempatkan	1 KK
	Program :		
	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	3	Program Hubungan Industrial	
	4	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
	5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
	Kegiatan :		
	1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
	2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	3	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	4	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
	5	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
	6	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	7	Kegiatan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
	8	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Keluaran Hasil Kegiatan dan sub kegiatan:		
	1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		Jumlah orang pencari kerja yg mengikuti pelatihan	
		Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi	
		Jumlah orang pencari kerja yg mengikuti pelatihan	
	2	Jumlah LPKS yang dibina	
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	
	3	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	
		Jumlah perusahaan yang melakukan pengukuran tenaga kerja	
	4	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	
	5	Jumlah CPM/PMI Yang Terlindungi	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi	
	6	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	
		Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial	
	7	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	8	Jumlah keseluruhan KK Transmigrasi yang ditempatkan	
		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	



November 2025
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen

Bokro Adinoto, S.P., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196611291987021004

Nama Pemilik	Kabupaten Natuna
Nama (PT)	Gunas Terapi Nita
Tahun Pendirian	2020
Pelaku yang diteliti	2020-2022
Tujuan Strategi	Memperkuat penguatan terapi seni yang bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan di sekitar lingkungan pasien UBT dengan membangun lingkungan Terapi seni, Transmigrasi dan Energi Rumatklinik Nita
Saluran Persepsi Sosial	

[illegible]

[illegible]

David R. Anderson, *University of Texas at San Antonio*

[illegible]

No.	Judul dan Sub Judul	Sifat dan Sub Sifat	Tipe	Status	Ruang Lingkup		Pencapaian	Jenis dan Sub Jenis		Kategori	Sub Kategori	Tipe	Sub Tipe	Jenis dan Sub Jenis	Kategori	Sub Kategori	Tipe	Sub Tipe																																																																																																																																																									
					Ruang Lingkup	Pencapaian		Jenis dan Sub Jenis	Kategori										Sub Kategori	Tipe	Sub Tipe																																																																																																																																																						
1.	Judul Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Sifat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Tipe Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Status Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Pencapaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Kategori Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Sub Kategori Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Tipe Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Sub Tipe Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Kategori Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Sub Kategori Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Tipe Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Sub Tipe Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Kategori Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri																																																																																																																																																									
																			2.	Judul Peraturan Menteri	Sifat Peraturan Menteri	Tipe Peraturan Menteri	Status Peraturan Menteri	Ruang Lingkup Peraturan Menteri	Pencapaian Peraturan Menteri	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Menteri	Kategori Peraturan Menteri	Sub Kategori Peraturan Menteri	Tipe Peraturan Menteri	Sub Tipe Peraturan Menteri	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Menteri	Kategori Peraturan Menteri	Sub Kategori Peraturan Menteri	Tipe Peraturan Menteri	Sub Tipe Peraturan Menteri																																																																																																																																								
																																				3.	Judul Peraturan Kepala Badan	Sifat Peraturan Kepala Badan	Tipe Peraturan Kepala Badan	Status Peraturan Kepala Badan	Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan	Pencapaian Peraturan Kepala Badan	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Kepala Badan	Kategori Peraturan Kepala Badan	Sub Kategori Peraturan Kepala Badan	Tipe Peraturan Kepala Badan	Sub Tipe Peraturan Kepala Badan	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Kepala Badan	Kategori Peraturan Kepala Badan	Sub Kategori Peraturan Kepala Badan	Tipe Peraturan Kepala Badan	Sub Tipe Peraturan Kepala Badan																																																																																																																							
																																																					4.	Judul Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Sifat Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Tipe Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Status Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Ruang Lingkup Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Pencapaian Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Kategori Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Sub Kategori Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Tipe Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Sub Tipe Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Kategori Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Sub Kategori Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Tipe Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	Sub Tipe Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota																																																																																																						
																																																																						5.	Judul Peraturan Desa	Sifat Peraturan Desa	Tipe Peraturan Desa	Status Peraturan Desa	Ruang Lingkup Peraturan Desa	Pencapaian Peraturan Desa	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Desa	Kategori Peraturan Desa	Sub Kategori Peraturan Desa	Tipe Peraturan Desa	Sub Tipe Peraturan Desa	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Desa	Kategori Peraturan Desa	Sub Kategori Peraturan Desa	Tipe Peraturan Desa	Sub Tipe Peraturan Desa																																																																																					
																																																																																							6.	Judul Peraturan Lembaga	Sifat Peraturan Lembaga	Tipe Peraturan Lembaga	Status Peraturan Lembaga	Ruang Lingkup Peraturan Lembaga	Pencapaian Peraturan Lembaga	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Lembaga	Kategori Peraturan Lembaga	Sub Kategori Peraturan Lembaga	Tipe Peraturan Lembaga	Sub Tipe Peraturan Lembaga	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Lembaga	Kategori Peraturan Lembaga	Sub Kategori Peraturan Lembaga	Tipe Peraturan Lembaga	Sub Tipe Peraturan Lembaga																																																																				
																																																																																																								7.	Judul Peraturan Mahkamah Agung	Sifat Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Status Peraturan Mahkamah Agung	Ruang Lingkup Peraturan Mahkamah Agung	Pencapaian Peraturan Mahkamah Agung	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Mahkamah Agung	Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Sub Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Sub Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Mahkamah Agung	Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Sub Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Sub Tipe Peraturan Mahkamah Agung																																																			
																																																																																																																									8.	Judul Peraturan Mahkamah Agung	Sifat Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Status Peraturan Mahkamah Agung	Ruang Lingkup Peraturan Mahkamah Agung	Pencapaian Peraturan Mahkamah Agung	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Mahkamah Agung	Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Sub Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Sub Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Mahkamah Agung	Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Sub Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Sub Tipe Peraturan Mahkamah Agung																																		
																																																																																																																																										9.	Judul Peraturan Mahkamah Agung	Sifat Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Status Peraturan Mahkamah Agung	Ruang Lingkup Peraturan Mahkamah Agung	Pencapaian Peraturan Mahkamah Agung	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Mahkamah Agung	Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Sub Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Sub Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Mahkamah Agung	Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Sub Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Sub Tipe Peraturan Mahkamah Agung																	
																																																																																																																																																											10.	Judul Peraturan Mahkamah Agung	Sifat Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Status Peraturan Mahkamah Agung	Ruang Lingkup Peraturan Mahkamah Agung	Pencapaian Peraturan Mahkamah Agung	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Mahkamah Agung	Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Sub Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Sub Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Jenis dan Sub Jenis Peraturan Mahkamah Agung	Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Sub Kategori Peraturan Mahkamah Agung	Tipe Peraturan Mahkamah Agung	Sub Tipe Peraturan Mahkamah Agung

Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kabupaten Kebumen : 2026				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan				
Urusan Pemerintahan		: Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumberdaya Mineral				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja						
1	Pelatihan belum menggunakan standar kompetensi	RSO.22.02.11.01	13	Kepala Dinas	Standart kompetensi pelatihan belum memenuhi syarat	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal
2	Penempatan tenaga bersifat rutinitas	RSO.22.02.11.02	13	Kepala Dinas	Penempatan tenaga kerja dari dunia usaha dan dunia industri, job carving, bursa kerja dan job fair belum maksimal	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal
III Risiko Operasional Dinas Tenaga Kerja						
1	Pelatihan belum menggunakan sarpras dan instruktur yang memenuhi syarat kompetensi	ROO.22.03.11.01	13	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industri	sarpras dan instruktur harus secara berkala meningkatkan kompetensi	Kualitas Pelatihan dan kompetensi calon tenaga kerja kurang maksimal
2	Job carving, bursa kerja dan job fair belum maksimal	RSO.07.11.03	13	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penganggaran dan SDM terbatas	Kualitas Penempatan kerja kurang maksimal
3	Kesesuaian antara pelatihan kerja dan kompetensi internasional yang dibutuhkan belum maksimal	RSO.07.11.04	13	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kuota dan Kurikulum pelatihan CPMI banyak belum sesuai	Pelatihan kerja dan kompetensi internasional yang dibutuhkan kurang maksimal

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b



**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda

Kabupaten Kebumen

Nama OPD

Dinas Tenaga Kerja

Tahun Penilaian

2026

Tujuan Strategis

Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan

Urusan Pemerintahan

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumberdaya Mineral

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tindak lanjut sosialisasi Pelindungan PMI belum maksimal sampai ke sasaran di wilayah, fasilitasi pelatihan CPMI belum bisa mengcover semua CPMI terdaftar	RSO 07.11 04.05	Perda Pelindungan TKI, Tim Satgas Pelindungan PMI, Perdes Pelindungan PMI, Komite bersama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kebumen	Kepala Desa belum menindaklanjuti sosialisasi secara optimal di wilayah. Anggaran belum bisa memfasilitasi semua CPMI terdaftar untuk mengikuti pelatihan	Sosialisasi Pelindungan PMI secara Maksimal	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 tahun



Raport tanggal November 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen

Cokro Anjoto, S.IP, M.Kes
NIP. 198611291987021004